

**EFEKTIVITAS KINERJA PPID PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG
DALAM MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK**

SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



IVANO RATIO IDEAL
NIM. 14042081/2014

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota
Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi
Kepada Publik

Nama : Ivano Ratio Ideal

Nim/IM : 14042081/2014

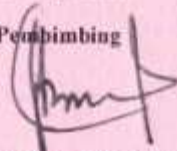
Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP 19640208 19903 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2019 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

**Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam
Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik**

Nama : Ivano Ratio Ideal
NIM : 14042081
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

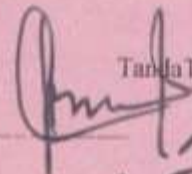
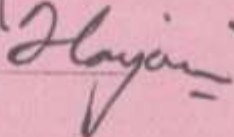
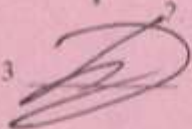
Padang, 31 Januari 2018

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
3. Anggota : Zikri Alhadi, S.IP, MA

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivano Ratio Ideal
NIM / TM : 14042081 / 2014
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **"Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik"** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Ivano Ratio Ideal

14042081/2014

ABSTRAK

**IVANO RATIO IDEAL :
14042081/2014**

**Efektivitas Kinerja PPID Pada
Sekretariat DPRD Kota Padang
Dalam Memberikan Keterbukaan
Informasi Kepada Publik.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran Efektivitas Kinerja PPID yang berada di Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik. Serta peneliti juga mengemukakan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam proses Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan *Purposive Sampling* dan Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik Melalui dua teori yaitu Efektivitas dan Kinerja. Efektivitas memiliki 6 indikator yaitu Kualitas, Kesiagaan, Motivasi, Penerimaan Tujuan Organisasi, dan Penilaian Oleh Pihak Luar. Sementara itu teori Kinerja memiliki 3 indikator diantaranya Efektivitas, Efisiensi dan Keadilan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang saat ini terlihat bahwa efektivitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID dalam memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik dengan mengacu kepada indikator yang dikemukakan Campbell bahwa dari 6 indikator yang dikemukakan Campbell sudah efektif. Serta kinerja yang dikemukakan oleh Pasolong terdiri dari 3 (tiga) indikator, dua diantaranya sudah efektif

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, PPID, Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DATAR TABEL.....	v
DAFTR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	6
1. Konsep Efektivitas	6
2. Kinerja	11
3. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.....	15
4. Teori Keterbukaan Informasi Publik	19
5. Teori Kendala	24
B. Kerangka Koneptual	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	27
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	33
----------------------	----

B. Temuan Khusus	36
C. Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	6

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Efektivitas Univariasi Menurut Campbell10

Tabel 2. Daftar Informan.....27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alun Panduan PPID Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	16
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Tugas Skripsi

Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi – informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasi Badan Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan – badan publik (www.setneg.go.id).

Lebih jauh Keterbukaan Informasi Publik dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip – prinsip *good governance*. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008.

Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu :

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas. (UU RI No 25 Tahun 2009, UU RI No 14 Tahun 2008).

Sesuai dengan amanat Undang – Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Kementerian Komunikasi RI, secara tegas memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kenijakan yang dihasilkan, kegiatan – kegiatan yang dilakukan termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

Di Kota Padang telah dilakukan pembentukan dan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pembentukan itu dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Padang No 50 Tahun 2017 tentang PPID.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang No 50 Tahun 2017 ada 51 Jabatan Kedinasan di Kota Padang yang harus melaksanakan PPID. Salah satunya berada di jabatan kedinasan kepala bagian humas dan protokol sekretariat DPRD Kota Padang.

Dari hasil studi pendahuluan pada bagian humas dan protokol sekretariat DPRD Kota Padang pada tanggal 8 Juli 2018 terungkap bahwa informasi yang bisa di akses untuk publik sulit di dapatkan, Hal itu disebabkan karena operator yang menjalankan aplikasi atau program PPID tersebut belum memadai. Dikarenakan *Website* resmi Sekretariat DPRD Kota Padang tidak aktif, apabila *Website* itu berjalan akan mempermudah publik yang memerlukan informasi dan dokumentasi dengan cara mengakses di internet.

Sehingga tidak menyulitkan publik untuk datang langsung ke Sekretariat DPRD Kota Padang untuk memperoleh informasi. (wawancara dengan Bapak Elfauzi, kepala sub bagian Publikasi dan Dokumentasi sekretariat DPRD Kota Padang, 8 Juli 2018).

Menurut Salah seorang staf bagian humas dan protokol sekretariat DPRD ibuk Rosmalina bahwa kinerja PPID di bagian humas dan protokol sekretariat DPRD Kota Padang belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan Keputusan Walikota Padang No 50 Tahun 2017. Salah satu penyebabnya dikarenakan *Website* resmi tersebut, Sehingga PPID selaku pengelola informasi maupun dokumentasi dari Sekreatriat DPRD Kota Padang tidak bisa menyebarkan informasi melalui *Website* resmi tersebut, sehingga operator pengelolaan informasi dokumentasi belum belum mampu menjalankan tugas – tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh operator PPID bagian humas dan protokol sekretariat DPRD Kota Padang.

Mendapatkan informasi mengenai Sekretariat DPRD Kota Padang tidak bisa di akses, karena belum adanya website resmi DPRD Kota Padang yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan Informasi dokumentasi perjalanan dan kegiatan seputar DPRD Kota Padang, hal ini sudah berlangsung selama 5 tahun tanpa adanya website resmi. Tidak adanya Website resmi DPRD Kota Padang menunjukkan tidak berjalannya fungsi dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Kota Padang yang berada pada bagian Humas dan Protokol. (wawancara dengan Bapak Elfauzi, kepala sub bagian Publikasi dan Dokumentasi sekretariat DPRD Kota Padang, 8 Juli 2018).

Mestinya, dengan adanya PPID yang dikelola pada bagian humas dan protokol sekretariat DPRD Kota Padang, masyarakat dapat mengetahui informasi yang menyangkut tentang keterbukaan informasi kepada publik pada Serkretariat DPRD Kota Padang.

(wawancara dengan Anita Widyowati salah seorang mahasiswa UNAND yang melakukan penelitian di DPRD Kota Padang).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:
Efektifitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik tidak terpublis kepada masyarakat.
- 2) Terhambatnya informasi yang diberikan dari DPRD karena tidak ada wadah dalam penyebaran informasi yang mudah di akses publik.
- 3) Sulitnya masyarakat memperoleh informasi pada PPID di sekretariat DPRD kota padang.
- 4) Website Resmi DPRD Kota Padang tidak berjalan/tidak aktif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi padaefektifitas kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanaefektifitas kinerjaPPIDpada Sekretariat DPRD Kota Padang dalammemberikan keterbukaanInformasi kepada publik?
- 2) Apasajakendaladalam mewujudkan efektifitas kinerjaPPIDpada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik?

- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan Informasi kepada publik?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui efektifitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik.
- 2) Untuk mengidentifikasikan kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik.
- 3) Mengidentifikasikan upaya dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Pengetahuan Administrasi Publik, khususnya tentang Pelayanan Publik.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a) Pemerintah, pengambil kebijakan sebagai penyedia informasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b) Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi, tanggapan dan keluhan yang dihadapi agar Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Padang mengetahui dan memperbaiki kinerja.